

## Analisis Penghitungan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Menggunakan Metode *Activity Based Costing* (ABC)

**Fazri Aslam<sup>1</sup>, Abriadi Rangkuti<sup>2</sup>, Arini<sup>3</sup>, Rika Ramadhani<sup>4</sup>, Fibri Rakhmawati<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Email:** <sup>1</sup>aslambazri@gmail.com, <sup>2</sup>abriadiray@gmail.com, <sup>3</sup>arinimagenta78@gmail.com, <sup>4</sup>rikaramadhani631@gmail.com, <sup>5</sup>fibri\_rakhmawati@uinsu.ac.id.

### ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan kegiatan dari yang tinggi sampai yang terendah dengan menggunakan perhitungan metode *Activity Based Costing* (ABC). Hasil penelitian menunjukkan dua analisis yaitu analisis pada bagian Subkegiatan dan analisis pada bagian belanja operasi. Data yang di gunakan yaitu Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau nominal, Data berupa Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau nominal, Data berupa observasi langsung dari BAPPEDA Kota Medan mengenai pelaksanaan APBD. Data yang di dapat dari PERWAL APBD 2022 Bagian BAPPEDA yaitu jumlah Anggaran belanja sebesar Rp. 27.307.689.269 dengan 3 kegiatan umum, 12 subkegiatan dan 48 jumlah belanja operasional.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *Activity Based Costing* (ABC)

### ABSTRACT

*The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), is the annual financial plan of regional governments in Indonesia which is approved by the Regional People's Representative Council. The APBD is determined by Regional Regulations and the APBD Fiscal Year covers a period of one year, starting from January 1 to December 31. This research aims to determine the grouping of activities from highest to lowest using the Activity Based Costing (ABC) method calculation. The research results show two analyzes, namely analysis in the sub-activities section and analysis in the operations expenditure section. The data used is Quantitative Data, which is data in the form of numbers or nominal data, data in the form of the Medan City BAPPEDA Budget Realization Report. Qualitative data is data that is not in the form of numbers or nominal, data in the form of direct observations from BAPPEDA Medan City regarding the implementation of the APBD. Data obtained from PERWAL APBD 2022 BAPPEDA Section is the total budget amount of Rp. 27,307,689,269 with 3 general activities, 12 sub-activities and 48 total operational expenditures.*

**Keywords:** *The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Activity Based Costing (ABC).*

### A. Pendahuluan

Anggaran belanja daerah atau yang lebih spesifik disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sedangkan fungsi APBD antara lain sebagai *Otoritas*, perencanaan, pengawasan, alokasi, *distribusi*,

dan *stabilitas* (BPKAD kuningan, 2024). APBD terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan dan pos-pos lain Pendapatan Daerah yang sah. di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh Pemerintah

Daerah dari Pemerintah Pusat sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos-pos lain pendapatan daerah yang sah (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat 4 pos utama dalam belanja daerah yaitu pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal dan pos belanja lainnya. melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja *transfer* (BPKAD Kuningan).

Dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. pada kenyataannya, didalam dokumen APBD sering kali terjadi defisit daerah. defisit daerah dapat ditutup dengan Pembiayaan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari 2 pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah Daerah memiliki kecenderungan untuk menutupi defisit daerah dari sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki 2 komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Fiskal atau ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur suatu fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total Pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana

Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Defisit atau surplus daerah merupakan selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah. defisit daerah ditutup oleh pembiayaan daerah yang meliputi penggunaan SiLPA, Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. sedangkan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimaksud disini adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Dalam APBD ini terdapat banyak sekali data-data dalam bentuk angka yang harus dihitung oleh karena itu metode, *Activity Based Costing* (ABC) adalah salah satu metode yang cocok dalam analisis penghitungan anggaran belanja daerah. *Activity Based Costing* mulyadi (2007) *activity based cost system* merupakan sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang dalam pengelolaan aktivitas. *Activity Based Costing* adalah sistem informasi biaya yang bermanfaat untuk memantau implementasi dari rencana. sistem ini merupakan alat manajemen kontemporer yang didesain untuk diterapkan dalam berbagai jenis perusahaan, diantaranya: manufaktur, jasa, dan barang. *Activity Based Costing* ini menyediakan informasi kos produk/jasa secara akurat sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh personel sebagai dasar yang dapat diandalkan untuk penetapan kebijakan harga jual produk dan jasa (Mulyadi dalam Ticoalu, 2020).

Tujuan dari penggunaan *Activity Based Costing* adalah untuk menentukan alokasi biaya secara objektif dengan mengidentifikasi skala keperluan sumber daya dan kaitannya dengan aktivitas. fungsi alokasi dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau untuk meningkatkan sumber daya manusia (Setyo et al., 2003).

## 1. Landasan Teori Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif dalam memberikan informasi rinci kepada DPRD dan masyarakat mengenai program-program yang direncanakan pemerintah. APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. APBD terdiri atas (Andriany Nasution, 2023):

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya.
  - b. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan lainnya.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
6. Fungsi *stabilitas* memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut (BPKAD):

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
  - b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Belanja daerah terdiri dari:
  - a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
  - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
  - c. Belanja Tidak Terduga.
  - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
  - a. penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

## 2. Defenisi Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC)

Dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas standar pelayanan minimal, maka pemerintah daerah hendaknya mampu menetapkan analisis standar belanja yang akurat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja anggaran yang baik. Selama ini biaya dalam anggaran ditetapkan berdasarkan line item anggaran, sehingga dampaknya terjadi *overfinancing* dan *underfinancing* dengan kata lain terjadi ketidakakuratan dan ketidakwajaran dalam menetapkan biaya dalam anggaran. Sekarang ini, banyak pemerintah daerah yang mencoba mencari formula untuk menetapkan standar biaya dalam anggaran. Salah satu pendekatan yang dikembangkan sebagai dasar untuk

menetapkan standar biaya yaitu pendekatan berbasis aktivitas (*Activity Based Costing*) (Fadilah, 2009).

ABC bisa dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan suatu perusahaan mengukur biaya dan efektivitas suatu produk, layanan dan aktivitas merupakan salah satu fungsi metode ABC, metode ini digunakan karena dapat mengambil suatu keputusan lebih baik karena perhitungan biaya suatu objek menjadi lebih baik (Sarasanty & Erna Tri Asmorowati, 2023).

*Activity based costing* merupakan penetapan harga pokok atau biaya anggaran yang didasarkan aktivitas. Artinya aktivitas menjadi pemicu biaya (*cost driver*) dalam pendekatan *Activity Based Costing* (ABC). Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (*the cost and performance of activities*) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik untuk operasional maupun untuk administratif (Fadilah, 2009).

Menurut Ahmad (2015) "*Activity Based Costing* (ABC)", Suatu Prosedur yang menghimpun biaya objek seperti produk, jasa, dan pelanggan. ABC pertama-tama membebankan biaya sumber daya ke aktivitas yang di bentuk oleh organisasi, kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk, pelanggan, dan jasa yang berguna untuk menciptakan permintaan atas aktivitas. Rudianto (2013) menyatakan bahwa *Activity Based Costing* (ABC) adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas (Lamrisma & Lilianti, 2019).

Krismiaji (2011) menyatakan *Activity Based Costing* adalah sebuah sistem yang pertama kali menelusuri biaya ke aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut dan membebankan biaya aktivitas kepada produk (Lamrisma & Lilianti, 2019).

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa *Activity Based Costing* (ABC) membebankan biaya *overhead* ke objek seperti produk dan jasa yang mengidentifikasi sumber daya dan juga aktivitas juga biaya yang di butuhkan untuk memproduksi output.dengan menggunakan penggerak biaya kosumsi sumber daya, perusahaan menentukan biaya sumber daya yang di kosumsi oleh aktivitas atau pusat aktivitas (tempat penampungan biaya aktivitas)

dan menghitung biaya dari unit aktivitas. Perusahaan membebankan biaya dari suatu aktivitas atau pusat aktivitas ke produk jadi dengan mengalihkan biaya dari setiap aktivitas dengan jumlah aktivitas yang di konsumsi oleh setiap objek biaya (Lamrisma & Lilianti, 2019).

Metode ABC merupakan metode klasifikasi yang mana metode ini mengidentifikasi dan mengelompokkan suatu item, pengklasifikasian merupakan salah satu metode statistik untuk mengelompokkan atau mengklarifikasikan suatu data yang disusun secara sistematis (Siahaan & Rosmaini, 2022).

### 3. Keunggulan Dan Kelemahan *Activity Based Costing* (ABC)

Menurut Ahmad (2015) Keunggulan dan Kelemahan Metode *Activity Based Costing* (ABC) adalah (Lamrisma & Lilianti, 2019):

Keunggulan ABC adalah:

- a. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informasi, yang mengarahkan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategik, tentang harga jual, produk, pasar dan pengeluaran modal.
- b. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk (*product value*) dan nilai proses (*proces value*).
- c. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan Keputusan.

Kelemahan ABC:

- a. Alokasi, beberapa biaya di alokasikan secara sembarangan, karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contoh pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi.
- b. Mengabaikan biaya, biaya tertentu yang diabaikan dari analisis contoh, iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya.

Pengeluaran dan waktu yang di konsumsi, di samping memerlukan biaya yang mahal juga memerlukan waktu yang cukup lama.

### 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu dan diukur dengan indikator tertentu yang disusun berdasarkan basis akrual guna mengukur suatu keberhasilan entitas. kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari

suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Assidi, 2016).

### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data perusahaan untuk dianalisis untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek penelitian. penelitian ini menggunakan strategi eksplorasi lapangan yang diselesaikan langsung di kantor BAPPEDA Kota Medan untuk mendeskripsikan kinerja belanja daerah dan laporan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah.

Tempat pemeriksaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan yang terletak di Lantai III Kantor BAPPEDA Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data adalah:

1. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau nominal. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau nominal. Data berupa observasi langsung dari BAPPEDA Kota Medan mengenai pelaksanaan APBD.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

1. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Medan untuk keperluan pembahasan penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung dua arah kepada narasumber dan informan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen Perwal APBD 2022 bagian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan sebagai sampel. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau sumber informasi online. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dari dokumen BAPPEDA dan Perwal APBD.

a. Meneguk informasi sebagai Laporan Realisasi APBD T.A 2022

b. Memperkirakan tingkat efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dari Laporan Realisasi APBD T.A 2022.

### C. Hasil dan Pembahasan

Jumlah Seluruh subkegiatan dalam anggaran belanja daerah sebanyak 12 jenis subkegiatan yang di bagi 3 bagian. Sementara untuk jumlah seluruh biaya belanja daerah BAPPEDA sebanyak Rp. 27.307.689.269. berikut adalah hasil analisis ABC berdasarkan jumlah belanja operasi dengan menggunakan data tahun 2022:

**Tabel 1.** Analisis ABC Berdasarkan Sub-kegiatan

Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	% Jumlah Biaya	Jumlah Sub kegiatan	%Jumlah Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12.740.851.588	46,66	6	50
B	Program Kordinasi dan sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.684.305.631	31,8	3	25
C	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.882.532.050	21,54	3	25
<b>Jumlah</b>		<b>27.307.689.269</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

1. Kelompok A : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 12.740.851.588 atau 46,66% dari jumlah subkegiatan sebanyak 6 atau 50% yang berarti kegiatan ini tergolong tinggi.
2. Kelompok B : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 8.684.305.631 atau 31,8% dari jumlah subkegiatan sebanyak 3 atau 25% yang berarti kegiatan ini tergolong sedang.
3. Kelompok C : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 5.882.532.050 atau 21,54% dari jumlah

subkegiatan sebanyak 3 atau 25% yang berarti kegiatan ini tergolong Rendah.

Jumlah Seluruh belanja operasi dalam anggaran belanja daerah sebanyak 48 jenis belanja operasi yang di bagi 3 bagian. Sementara untuk jumlah seluruh biaya belanja daerah Bappeda sebanyak Rp. 27.307.689.269. Berikut adalah hasil analisis ABC berdasarkan jumlah belanja operasi dengan menggunakan data Tahun 2022:

**Tabel 2.** Analisis ABC Berdasarkan Belanja Operasi

Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	% Jumlah Biaya	Jumlah Belanja Operasi	% Jumlah Belanja Operasi
A	Program Kordinasi dan sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.684.305.631	31,8	24	50
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12.740.851.588	46,66	12	25

Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	% Jumlah Biaya	Jumlah Belanja Operasi	% Jumlah Belanja Operasi
C	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.882.532.050	21,54	12	25
<b>Jumlah</b>		27.307.689.269	100	48	100

1. Kelompok A : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 8.684.305.631 atau 31,8% dari jumlah belanja operasi sebanyak 24 kegiatan atau 50% yang berarti kegiatan ini tergolong tinggi.
2. Kelompok B : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 12.740.851.588 atau 46,66% dari jumlah belanja operasi sebanyak 12 kegiatan atau 25% yang berarti kegiatan ini tergolong sedang.
3. Kelompok C : Jumlah biaya belanja yaitu Rp. 5.882.532.050 atau 21,54% dari jumlah belanja operasi sebanyak 12 kegiatan atau 25% yang berarti kegiatan ini tergolong Rendah.

#### D. Kesimpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan:

Pada Analisis bagian Subkegiatan menggunakan metode ABC kelompok A dengan Subkegiatan yaitu 6 jumlah Subkegiatan atau 50% dari seluruh Subkegiatan dan menggunakan dana belanja sebesar Rp. 12.740.851.588 atau 46.66% dari seluruh jumlah anggaran belanja memiliki nilai atau golongan tinggi. Yang berarti kegiatan dengan tema Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih tinggi/besar dari tema-tema kegiatan lainnya.

Pada Analisis bagian belanja operasi menggunakan metode ABC kelompok A dengan kegiatan belanja operasi yaitu 24 jumlah belanja operasi atau 50% dari seluruh kegiatan belanja operasi dan menggunakan dana belanja sebesar Rp. 8.684.305.631 atau 31.8% dari seluruh jumlah anggaran belanja memiliki nilai atau golongan tinggi. Yang berarti kegiatan dengan tema Program Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah lebih tinggi/besar dari tema-tema kegiatan lainnya.

##### 2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya ada baiknya untuk melakukan perhitungan dengan kasus yang berbeda atau melakukan perhitungan yang sama dengan tempat yang berbeda untuk dapat melakukan suatu perbandingan.

#### E. Daftar Pustaka

- Andriany Nasution, N. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Aktual STIE Trisna Negara*, 21(2), 1–10.
- Assidi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11.
- Fadilah, S. (2009). Activity Based Costing (ABC) Sebagai Pendekatan Baru Untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(1), 54–78.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)*, 20, 20.
- Lamrisma, L., & Lilianti, E. (2019). Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing (ABC) Dalam Menentukan Tarif Jasa Rawat Inap Di RSUD Kota Prabumulih. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v1i1.2365>
- Sarasanty, D., & Erna Tri Asmorowati. (2023). Implementation of the Activity Based Costing Method in Construction. *Jurnal Pensil*, 12(1), 77–86. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v12i1.32323>
- Setyo, R., Ahmadi, N. U. R., Studi, P., Industri, T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2003). *berkas DPR*. 17, 147–173.
- Siahaan, M. I., & Rosmaini, E. (2022). Use of Classification and Regression Tree (CART) Method for Classification of Labor Force Participation Levels in Medan City in 2019. *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 95–103.

- <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.386>  
Ticoalu, S. R. (2020). Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya Dengan Penerapan Activity Based Management. (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58884>
- Wali Kota Medan. (2022). *Perwal Kota Medan Nomor 93 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023*. Medan.